

TANTANGAN
TRANSPORTASI LOGISTIK JAWA TIMUR

DPC APTRINDO KOTA SURABAYA

PROFILE APTRINDO

ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
APTRINDO
INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION





ANGGOTA RESMI :

KADIN INDONESIA

ASEAN TRUCKING FEDERATION

MITRA KERJA :

PELINDO

Didirikan pada tanggal 19 Agustus 2014, APTRINDO adalah sebuah wadah Organisasi non-profit yang mengorganisir para Pengusaha Truk Indonesia. Berperan sebagai sebuah lembaga yang berupaya melindungi kepentingan para anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan dan kebijakan (regulasi) dalam bidang transportasi dan logistik.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
24 PROVINSI

DEWAN PIMPINAN CABANG
40 KABUPATEN / KOTA

AGENDA AUDIENSI KADIN JATIM

- KEBIJAKAN ZERO ODOL: IMPLEMENTASI & DAMPAK
- KENDALA BARCODE SOLAR BBM SUBSIDI
- ISU KENAIKAN PAJAK TRUK TRAILER
- USULAN & REKOMENDASI UNTUK KADIN JATIM



DINAMIKA FAKTOR PENDORONG



ZERO ODOL ROADMAP

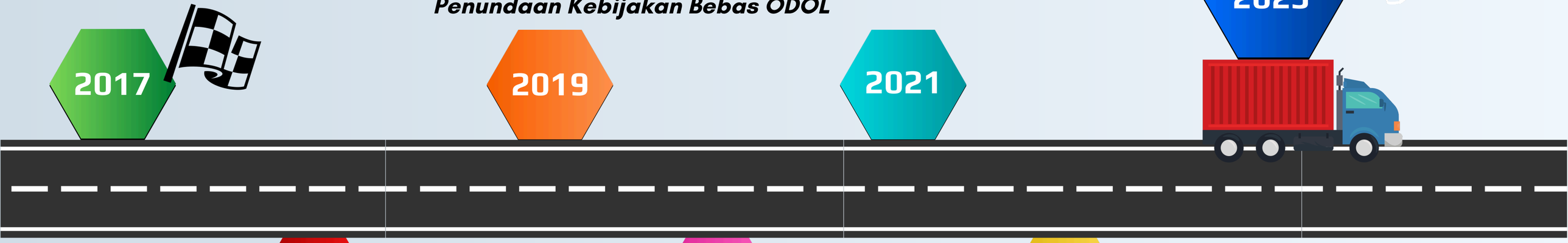
Kebijakan bebas ODOL diluncurkan
Asosiasi minta penundaan ke 2018 dan telah disepakati

Rencana Aksi Bebas ODOL 2019 – 2021

- Toleransikelebihan muatan untuk bahan pokok & penting Pemotongan kendaraan over dimensi
- Pemrosesan hukum pelanggaran over dimensi (Pasal 277)

Surat Menperin tentang Penundaan Kebijakan Bebas ODOL

Indonesia Bebas ODOL



Sosialisasi bebas ODOL

Rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri, & Asosiasi Industri dengan Kesepakatan bebas ODOL 2023

2026

KONDISI TERKINI

PENERAPAN

Pemerintah resmi menerapkan Zero ODOL secara nasional mulai 1 Juni 2025

PROGRESS

Sosialisasi 1-30 Juni 2025, Teguran 1-13 Juli 2025, Penegakan hukum 14-27 Juli 2025 via Operasi Patuh

KENDALA

Akibat dari Kebijakan ODOL ini menyebabkan Kegiatan Pengangkutan Barang Heavy Duty untuk Pembangunan Pabrik yang melintasi Jalan Raya dan Tol harus melalui BBPJN JATIM (**Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur**) yang mana hal tersebut prosesnya lama serta biaya yang tinggi.



DAMPAK KEBIJAKAN ZERO ODOL
DI JAWA TIMUR

ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
APTRINDO
INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION

RITASE TURUN 30-40%

TRUK YANG TADINYA MUAT 35 TON, KINI HANYA 20-25 TON SESUAI JBI

KEBUTUHAN ARMADA NAIK

UNTUK ANGKUT 1000 TON/BULAN, BUTUH 50 RIT JADI 67 RIT

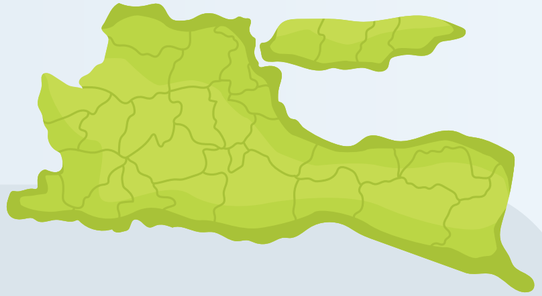
RISIKO RANTAI PASOK

DELAY PROYEK, PENALTI KETERLAMBATAN, STOK MENUMPUK DI GUDANG

BIAYA OPERASIONAL/UNIT BARANG NAIK

BBM, TOL, SUPIR, MAINTENANCE NAIK PER TON

MEMPERLAMPAT PEMBANGUNAN INDUSTRI DI JAWA TIMUR SERTA MENUNDA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DARI MASYARAKAT



USULAN KEBIJAKAN & SOLUSI ke KADIN JATIM

Perlunya membuat kebijakan dengan pendekatan kolaboratif, berkeadilan dan solusi berbasis realita di lapang serta ***memangkas Birokrasi*** *dan biaya yang timbul.*

KIR AMNESTI

Mengakomodir legalisasi surat kendaraan

PEMBENTUKAN DESK KHUSUS

Pusat koordinasi dan Informasi

DIGITALISASI PENGAWASAN

- Weight In Motion (WIM)
- Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
- Meminimalkan kontak dengan Petugas

INSENTIF EKONOMI

- Pengurangan Pajak KB & Opsen
- Diskon Tarif Tol
- Peremajaan Kendaraan

REFORMASI REGULASI

Revisi / Hapus Regulasi / Harmonisasi

DASAR HUKUM

- **UU NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK & GAS BUMI**
  (PASAL 20, PASAL 21 DAN PASAL 53)

- **PERATURAN PRESIDEN NOMOR NO. 191 TAHUN 2014**
  1. **Pasal 2 : Pemerintah menetapkan jenis BBM Subsidi dan siapa yang berhak**
  2. **Pasal 14 : Pengawasan distribusi BBM dilakukan untuk menjamin tepat sasaran.**

- **PERATURAN PRESIDEN NOMOR NO. 191 TAHUN 2014**

- **PERATURAN BPH MIGAS NO. 6 TAHUN 2013**
  1. Pasal 3 : Pengguna BBM Subsidi wajib menunjukkan identitas resmi
  2. Pasal 11 : SPBU dapat menggunakan sistem informasi seperti QR Code untuk mencatat dan mengontrol transaksi.

My PERTAMINA

Alat atau mekanisme teknis yang digunakan oleh Pertamina untuk menjalankan mandat yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

- **Mengatur Pembelian**
- **Menyalurkan Subsidi Tepat Sasaran**
- **Pengawasan Distribusi**

FAKTA & REALITA DILAPANGAN

KELUHAN UTAMA :

1.Proses Pendaftaran Lambat & Tidak Transparan.
2.Persyaratan teknis administrasi tidak realistis.
3.QR Code sering diblokir tiba-tiba tanpa alasan jelas.
4.Tidak ada pusat layanan tatap muka.
5.Jalur komunikasi utama hanya melalui Call Center “135”.



PROSES PENDAFTARAN & VALIDASI RUMIT

1. VALIDASI AKUN BISA MENCAPAI 14 HARI KERJA ATAU LEBIH.
2. DOKUMEN SERING DITOLAK DENGAN ALASAN YANG TIDAK JELAS.
3. TIDAK ADA SISTEM NOTIFIKASI ATAU MONITORING PROGRES PENGAJUAN VALIDASI.

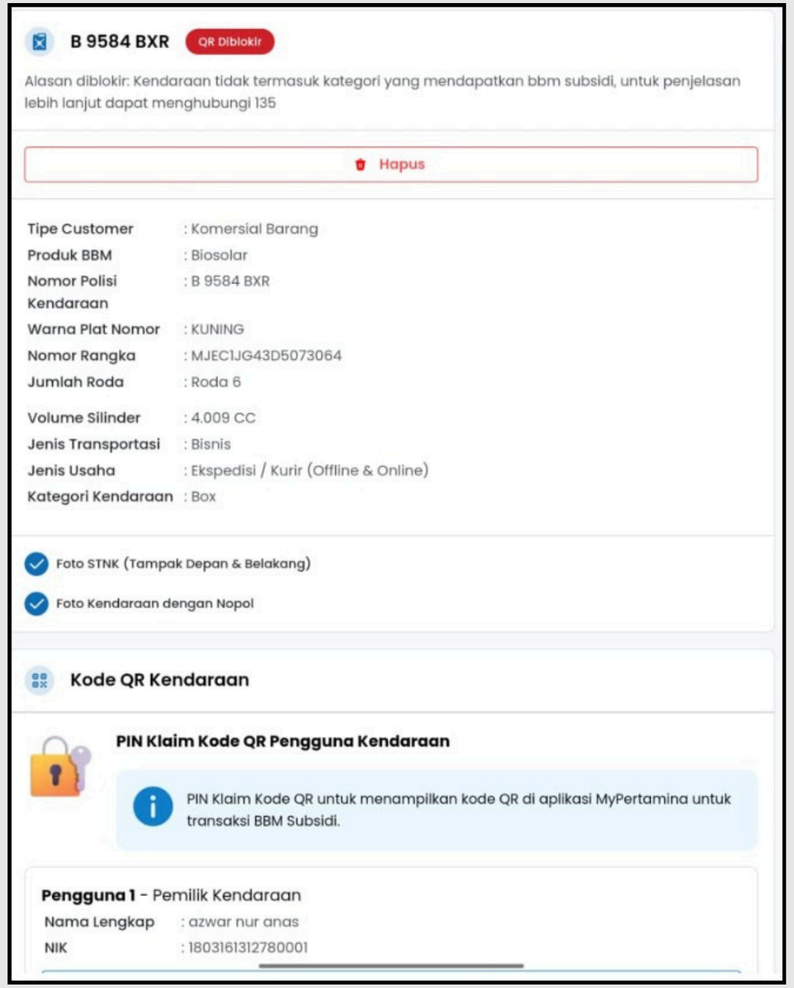
AKIBATNYA :
Kendaraan tidak dapat membeli BBM Subsidi / Armada BERHENTI BEROPERASI

QR CODE TERBLOKIR
TIDAK JELAS

- **QR CODE mendadak terblokir tidak dapat digunakan.**
- Alasan umum sistem :

1. **Kuota Habis (padahal seharian belum digunakan)**
2. **Indikasi penyalahgunaan**

- Tidak ada pemberitahuan resmi, laporan audit, atau kanal klarifikasi
- Pemulihan memakan waktu panjang dan bergantung pada pendaftaran ulang



MINIM LAYANAN SALURAN PENGADUAN

SALURAN PENGADUAN HANYA :

CALL CENTER “135”

(mesin penjawab bukan petugas langsung)

1. TIDAK ADA HELPDESK FISIK (SEMUA HANYA MELALUI ONLINE)
2. PROSES TIKET DAN TINDAK LANJUT TIDAK DAPAT DIMONITOR ATAUPUN DILACAK

REKOMENDASI / USULAN APTRINDO

1.AKUN KHUSUS PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN PROSES LEBIH MUDAH DAN CEPAT

- **Berbasis Perijinan Usaha khusus Angkutan Barang KBLI 49431 (Perusahaan Angkutan Barang Umum) dan KBLI 49432 (Perusahaan Angkutan Barang Khusus).**

- Adanya Fitur Alih Akun - Jika Sopir Berganti

2. PERSYARATAN YANG LEBIH ADAPTIF (TIDAK TERKESAN MEMPERSULIT / MENGHAMBAT USAHA)

- Proses foto kendaraan harus melalui HP sesuai akun.
- Persyaratan foto BPKB ASLI harus bisa diganti dengan Surat Keterangan Leasing/Bank jika kendaraan masih dalam status agunan/kredit.

3. TRANSPARANSI ALASAN BLOKIR & KUOTA

- Notifikasi otomatis by email atau pesan wa sesuai nomor HP Akun

REKOMENDASI / USULAN APTRINDO

4. PERCEPATAN PROSES VALIDASI & PEMULIHAN AKUN (<48 JAM)

- Prioritas bagi kendaraan logistik

5. BENTUK DESK KHUSUS MYPERTAMINA DI SETIAP DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Pusat Layanan Fisik (Helpdesk) disetiap cabang Pertamina Patra Niaga
- Jalur komunikasi langsung dan solusi cepat

KENAIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



KONDISI TERKINI

1. UU HKPD memberi ruang kenaikan tarif PKB & BBNKB oleh Pemda
2. NJKB truk trailer di atas Rp1M membuat PKB tahunan cukup tinggi
3. Pelaksanaan Opsen pajak 66% untuk PKB & BBNKB mulai 2025 dikhawatirkan memberatkan

DAMPAK KE PELAKU USAHA JATIM

BIAYA KEPEMILIKAN NAIK
PKB + SWDKLLJ UNTUK 1 UNIT TRAILER BISA >RP15-25 JT/TAHUN

IKLIM INVESTASI
PENGUSAHA TUNDA PEREMAJAAN ARMADA KARENA BEBAN PAJAK

DAYA SAING
BIAYA LOGISTIK JATIM JADI LEBIH MAHAL VS PROVINSI LAIN

MEMBUTUHKAN SURAT REKOMENDASI DISHUB DALAM PENGURUSAN VERIFIKASI OSS UNTUK PENGAJUAN KENDARAAN PLAT KUNING

USULAN KE KADIN JATIM TERKAIT KENAIKAN PKB

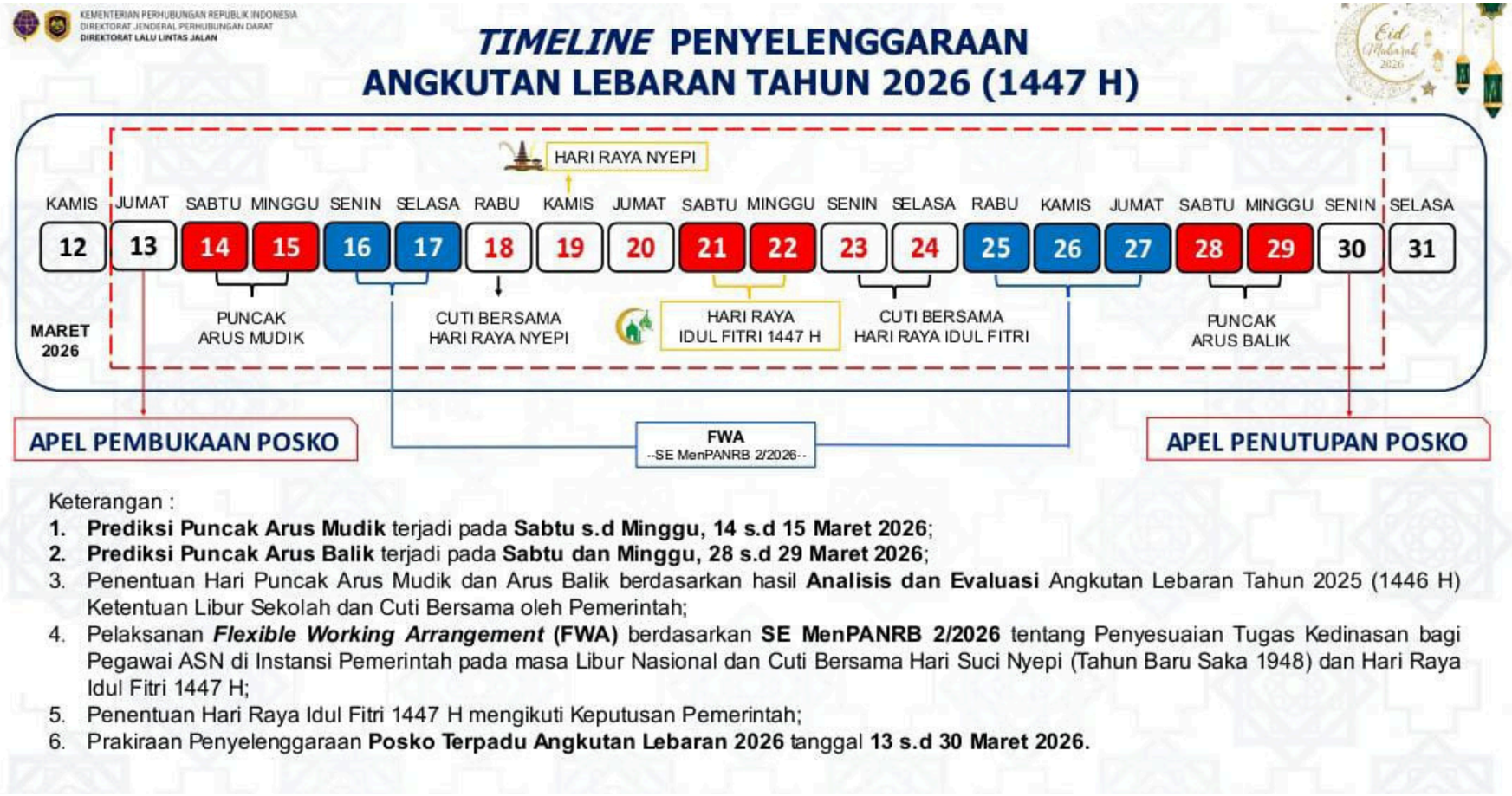


- MINTA PEMPROV JATIM MENUNDA / MENGATUR ULANG OPSEN PKB UNTUK ANGKUTAN BARANG
- SKEMA INSENTIF PKB UNTUK ARMADA BARU YANG NON-ODOL & RAMAH LINGKUNGAN
- DIALOG TRIPARTIT
  1. PEMERINTAH : DISHUB JATIM, BAPENDA JATIM & POLDA JATIM
  2. PENGUSAHA : APTRINDO
  3. MEDIATOR : KADIN JATIM

PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG

BEBAN BARU PENGUSAHA TRUK

Dampak Kebijakan Pembatasan Terhadap Kelangsungan Usaha Logistik



Keterangan :

1. **Prediksi Puncak Arus Mudik** terjadi pada **Sabtu s.d Minggu, 14 s.d 15 Maret 2026**;
2. **Prediksi Puncak Arus Balik** terjadi pada **Sabtu dan Minggu, 28 s.d 29 Maret 2026**;
3. Penentuan Hari Puncak Arus Mudik dan Arus Balik berdasarkan hasil **Analisis dan Evaluasi** Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) Ketentuan Libur Sekolah dan Cuti Bersama oleh Pemerintah;
4. Pelaksanan ***Flexible Working Arrangement*** **(FWA)** berdasarkan **SE MenPANRB 2/2026** tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H;
5. Penentuan Hari Raya Idul Fitri 1447 H mengikuti Keputusan Pemerintah;
6. Prakiraan Penyelenggaraan **Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2026** tanggal **13 s.d 30 Maret 2026.**

PEMBATASAN MAKIN KETAT TIAP TAHUN

DAMPAK KE PELAKU USAHA JATIM

DURASI MAKIN PANJANG: DULU H-3 S/D H+2, SEKARANG BISA H-7 S/D H+7 LEBARAN + NATARU + LONG WEEKEND

JENIS TRUK
TIDAK HANYA ODOL, SUMBU 2 PUN KENA DI BEBERAPA RUAS

RUAS MAKIN LUAS: DULU HANYA TOL TRANS JAWA, SEKARANG MASUK ARTERI, JALAN WISATA, AKSES PELABUHAN

TRUK YANG MENGANGKUT KOMODITAS EKSPOR / IMPORT TERKENA PEMBATASAN YANG MENYEBABKAN PENUMPUKAN DI PELABUHAN DAN DEPO

BEBAN TURUNAN YANG TIDAK TERLIHAT



DAMPAK KE PELAKU USAHA JATIM

KONTRAK PUTUS
PABRIK CARI EKSPEDISI YANG BISA JAMIN SLA. TRUK DILARANG JALAN = DIANGGAP WANPRESTASI

CICILAN LEASING
TRUK DIAM 10 HARI TAPI CICILAN + BUNGA TETAP.

PHK SUPIR/KERNET
TIDAK ADA TRIP = TIDAK ADA UANG JALAN.
BANYAK SUPIR LEPAS RESIGN

BIAYA SILUMAN
"UANG KOORDINASI" DI LAPANGAN AGAR BISA MELINTAS DARURAT

DISTORSI PASAR
ARMADA BESAR KUAT NAHAN,
UMKM TRUK 1-2 UNIT GULUNG TIKAR

IRONI KEBIJAKAN
TUJUANNYA BAIK, EKSEKUSINYA BERAT SEBELAH



- TUJUAN : LANCAR MUDIK, KURANGI KECELAKAAN.
  REALITA : BIANG MACET BUKAN HANYA TRUK, TAPI VOLUME MOBIL PRIBADI 80%+
- DIKECUALIKAN : SEMBAKO, BBM.
  REALITA: DEFINISI "SEMBAKO" KAKU. EXPORT IMPORT, BAHAN BAKU PABRIK, SPAREPART TIDAK DIANGGAP PENTING
- SOLUSI PEMERINTAH: ALIHKAN KE KERETA/KAPAL.
  REALITA: STASIUN BONGKAR MUAT TERBATAS, LAST MILE TETAP BUTUH TRUK, BIAYA DOUBLE HANDLING NAIK 40%
- ODOL JADI KAMBING HITAM: TRUK TAAT DIMENSI & MUATAN TETAP KENA LARANGAN PUKUL RATA

KADIN SURABAYA



TERIMA KASIH

"Kebijakan baik perlu Implementasi yang bijak"

Kolaborasi KADIN, APTRINDO, dan pemerintah dalam rangka menjaga daya saing logistik Jawa Timur.